

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Film Indonesia mencapai puncak produksinya selama tahun 1950-an dengan 65 judul film pada tahun 1955.<sup>1</sup> Periode tahun 1950-an juga ditandai dengan semakin banyak film impor yang masuk ke Indonesia. Sebagian besar film impor ini berasal dari Amerika Serikat yang masuk melalui agennya AMPAI (*American Motion Pictures Association Indonesia*), Inggris, Italy dan sebagian lainnya berasal dari negara-negara Asia (Cina, India, Malaysia dan Filipina).<sup>2</sup> Pada tahun 1956 jumlah produksi film Indonesia turun menjadi 36 film.<sup>3</sup> Keadaan perfilman Indonesia diperparah karena begitu banyak film Malaysia dan India yang masuk dan menjadi saingan berat film nasional di bioskop kelas dua, sedangkan film Amerika mendominasi bioskop-bioskop kelas satu.<sup>4</sup> Pemerintah sendiri saat itu kurang begitu memperhatikan bidang perfilman. Hal ini terbukti dengan tidak ada satu departemen pun yang ditunjuk untuk mengurus masalah perfilman.

Pada tahun 1957 perfilman Indonesia dilanda krisis yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dan politik yang kurang stabil karena terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Oleh karena itu kalangan produser film Indonesia yang dipimpin oleh *Djamaludin Malik* dan *Usmar Ismail* mengeluarkan

---

<sup>1</sup> Grafik Produksi Film Cerita Indonesia. Sinematek Indonesia (Pusat Perfilman H. Usmar Ismail). Lihat juga J.B Kristanto. Katalog Film Indonesia 1926-2007. Jakarta: Nalar. 2007. hlm. 37.

<sup>2</sup> Haris Jauhari (ed.). *Layar Perak: 90 Tahun Bioskop di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Dewan Film Nasional. 1992. hlm. 53.

<sup>3</sup> Grafik Produksi Film Cerita Indonesia. Sinematek Indonesia (Pusat Perfilman H. Usmar Ismail).

<sup>4</sup> Penggolongan bioskop tahun ini berdasarkan fasilitas yang diberikan bioskop tersebut, namun tidak dijelaskan secara rinci apa saja fasilitas tersebut. Bioskop golongan A tiket masuknya:Rp. 4.50, golongan B: Rp. 2 , golongan C:Rp. 1. H. M Johan Tjasmadi. *100 Tahun Bioskop Indonesia (1900-2000)*. Bandung: Megindo Tunggal Utama. 2008, hlm. 56.

keputusan untuk menghentikan produksinya karena pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap bidang perfilman.<sup>5</sup> Hal ini kemudian mendapat tanggapan dari Menteri Perekonomian Burhanuddin yang setuju diperlukannya satu departemen yang secara khusus mengurus perfilman. Menanggapi hal ini pemerintah kemudian meminta agar pengurus PPF (Persatuan Perusahaan Film Indonesia) untuk kembali berproduksi walaupun belum jelas kapan permintaan PPF ini direalisasikan.<sup>6</sup> PPF sendiri merupakan wadah persatuan produser film yang didirikan pada tanggal 13 Agustus 1954 dan diketuai oleh Usmar Ismail.<sup>7</sup> Selama tahun 1959 sendiri, terjadi kecenderungan dari berbagai lembaga kebudayaan untuk berlandung di bawah sayap partai politik seperti NU (Nahdlatul Ulama) dan PKI (Partai Komunis Indonesia). PPF yang melakukan penghentian produksi dan menutup sejumlah studio film mendapat kecaman dari Lekra (*Lembaga Kebudayaan Rakyat*).<sup>8</sup> Untuk mengatasi permasalahan ini kemudian diadakan Musyawarah Film Nasional pada bulan Oktober 1959 yang diprakarsai oleh Djamaludin Malik. Pemerintah kemudian mengatasi kekurangan modal di kalangan pengusaha perfilman pada tahun ini dengan menginstruksikan kepada bank-bank pemerintah dan perusahaan-perusahaan milik negara untuk membantu pengusaha perfilman tersebut.<sup>9</sup>

Tahun 1960-an perfilman Indonesia diwarnai oleh banyak tekanan politik dari PKI melalui organisasi bawahannya (*onderbouw*) di bidang kesenian dan kebudayaan yang dikenal dengan nama Lekra. Melalui Lekra, PKI memperkenalkan serta memperjuangkan konsep “Politik adalah Panglima” dengan gigih dalam segenap kehidupan rakyat Indonesia termasuk dalam bidang

---

<sup>5</sup> *Harian Rak'jat*. Selasa, 19 Maret 1957.

<sup>6</sup> Sailm Said. *Profil Dunia Film Indonesia*. Jakarta: Grafiti pers. 1982. Hlm. 46.

<sup>7</sup> Winarno Sudjas. *Peta Perfilman Indonesia*. Jakarta: Asisten Deputi Urusan Fasilitas dan Pengembangan Perfilman Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI. 2002. Hlm. 15. PPF berdiri dengan nama Persatuan Produser Film Indonesia kemudian pada tanggal 16 Juli berganti nama menjadi Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI).

<sup>8</sup> Budi Irawanto. *Film Ideologi dan Militer. Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia (Analisa Semiotik terhadap Enam Djam di Jogja, Janur Kuning, dan Serangan Fajar)*. Yogyakarta: Media Pressindo. 1999. hlm. 81.

<sup>9</sup> Salim Said. *Op. Cit.*, hlm. 64.

perfilman.<sup>10</sup> Pada awal tahun 1960-an kegiatan perfilman sudah berada dalam satu wadah yang berbentuk dewan dengan anggota dari berbagai kantor pemerintah. Dewan Film yang diketuai oleh kolonel *Soekardjo* ini dibentuk berdasarkan surat keputusan Perdana Menteri No. 95/PM/1959. Akan tetapi, PPFII masih tetap menuntut bahwa pembinaan perfilman nasional harus berada dibawah salah satu departemen pemerintah. Keinginan itu akhirnya dipenuhi oleh pemerintah lewat Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1, tanggal 5 Maret 1964 yang menetapkan pembinaan perfilman berada dibawah wewenang Departemen Penerangan (Deppen).<sup>11</sup> Keputusan ini dianggap merugikan LEKRA dan simpatisannya karena Deppen yang dipimpin oleh *Mayor Jendral Achmadi* tidak dekat terhadap PKI. Kekecewaan PKI terhadap Penpres ini akhirnya menyebabkan munculnya aksi-aksi yang dilakukan oleh Pappias dengan pengganggangan film-film imprealis Amerika Serikat. Puncak dari kekesalan ini adalah aksi pemboikotan total yang dilakukan oleh para simpatisan Lekra terhadap film-film Amerika Serikat pada tanggal 7 Mei 1964.<sup>12</sup> Aksi pengganggangan dan pemboikotan tersebut sangat berpengaruh terhadap bisnis perbioskopian dalam negeri yang selama ini bergantung pada film Amerika. Keadaan ini diperparah dengan penurunan produksi film nasional pada waktu itu. Pemerintah kemudian segera mengantisipasi hal ini dengan memasok film-film dari negara sosialis seperti Cina dan Rusia. Akan tetapi, tindakan ini tidak membawa dampak yang cukup berarti bagi bisnis perbioskopian dalam negeri. Hal ini dikarenakan film-film dari negara sosialis ternyata tidak diminati oleh penonton karena tema ceritanya yang tidak menarik.

---

<sup>10</sup> Sumber PKI menyebutkan bahwa “Politik adalah Panglima” sebagai suatu asas penciptaan diterima secara aklamasi oleh para peserta KSSR (Konperensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner) yang berlangsung di Jakarta dari tanggal 27 Agustus hingga 2 September 1964. Pada konperensi yang dihadiri oleh sekitar 500 anggota Lekra dan simpatisannya itu telah pula ditetapkan 5 pedoman penciptaan yang berdasar pada asas “Politik adalah Panglima” itu. Pedoman-pedoman itu ialah: “memadukan , meluaskan dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, tradisi dan kekinian revolusioner, kreativitet individuil dan kearifan massa serta realisme revolusioner dan romantisme revolusioner.” Salim Said. *Ibid.* hlm. 59.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>12</sup> *Harian Rak'jat.* Djum'at 8 Mei 1964.

Setelah krisis politik pada tahun 1965, keadaan politik dan ekonomi Indonesia masih dalam keadaan yang tidak stabil. Pada masa ini perfilman Indonesia juga mulai mencoba kembali bangkit dari keterpurukan. Tahun 1966 tak kurang dari 11 judul film dihasilkan. Film-film pada tahun tersebut diantaranya: *Belaian Kasih* (PT Sarinande Film), *Bunga Putih* (PT Agora Film), *Cheque AA* (Sanggar Karya Film), *Dibalik Tjahaja Gelap* (Persari, Perfini, Ifdil Film), *Fadjar Diteengah Kabut* (Pertisa Film), *Fadjar Menyingsing Dipermukaan Laut* (Perfini, Bank Negara Indonesia), *Hantjurnya Petualang*, *Kini Kau Kembali*, *Minah Gadis Dusun*, *Suzie*, dan *Terpesona*.<sup>13</sup> Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 50% dibanding tahun sebelumnya. Perekonomian yang belum sehat akibat pengaruh situasi politik dan keamanan menjadi salah satu sebabnya. Pada saat film-film Amerika masih dimusuhi yang menyebabkan eksportir film Amerika tidak mau menjual filmnya ke Indonesia, sepanjang tahun 1966 film Jepang meramaikan bioskop-bioskop Indonesia. Sementara itu dari inventarisasi Deppen terhadap sarana dan manusia yang bergerak di dunia film, terlihat bahwa akibat pengganggangan kepada orang-orang film yang tidak sehaluan dengan garis politik PKI menyebabkan sejumlah besar tenaga melarikan diri dari dunia perfilman. Modal para pengusaha perfilman hampir tidak ada, sementara uang yang ditanamkan oleh berbagai perusahaan negara, Departemen dan Bank pada sejumlah film yang dibuat pada masa itu tidak bisa diharapkan. Selain karena pengelolaan yang kacau sebagai akibat kurang kontrol, film-film itu juga sulit beredar di bioskop karena distribusi yang kacau-balau dan kondisi perbioskopian yang menyedihkan.

Sebagai kelanjutan dari Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1964, pemerintah Orde Baru pada tahun 1967 melalui Departemen Penerangan membentuk “*Direktorat Film*”, yang merupakan sebuah badan yang bertugas mengatur perfilman nasional. Setelah Direktorat Film terbentuk, pemerintah Orde Baru mulai mencoba mengatasi kelesuan di bidang film dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Tindakan pertama yang diambil adalah menyuplai ulang (resupply)

---

<sup>13</sup> J.B Kristanto. *Katalog Film Indonesia 1926-2007*. Jakarta: Penerbit NALAR bekerjasama dengan Direktorat Perfilman, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia. 2007. hlm. 70.

bioskop-bioskop Indonesia dengan 300 judul film pada tahun 1967.<sup>14</sup> Hal ini disebabkan karena adanya sejumlah laporan yang mengatakan bahwa sebagian besar kota-kota kecil tidak lagi memiliki bioskop karena produksi film saat itu kurang. Keadaan ini disinyalir dapat menimbulkan bahaya laten berupa penggunaan bekas gedung bioskop untuk tempat pertunjukan ketoprak dan ludruk yang bersifat indoktrinasi sisa-sisa gerakan politik PKI.<sup>15</sup> Akan tetapi, untuk memenuhi jumlah film sebanyak itu diperlukan biaya yang sangat besar. Pemerintah kemudian mengundang kepada siapa saja yang berminat untuk dapat mengimpor film. Hal ini berarti pemerintah memberikan kebebasan bagi para importir untuk memasukkan film impor sebanyak-banyaknya. Hasilnya adalah banyak film-film impor beredar di Indonesia, keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun Perfilman Nasional. Pemerintah kemudian mengeluarkan keputusan Menpen No. 71/SK/M/1967 tertanggal 15 Desember 1967 yang mewajibkan semua importir film untuk membeli saham produksi dan rehabilitasi perfilman nasional seharga Rp. 250.000 bagi setiap judul film yang mereka impor mulai 1 Januari 1968.<sup>16</sup> Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah produksi film dalam negeri serta membangun kembali perfilman nasional.

Selain mengeluarkan SK Menpen 71 pemerintah dalam hal ini melalui Deppen kemudian juga mengeluarkan sejumlah kebijakan lain diantaranya: penghapusan pajak karcis bioskop dan pembentukan DPFN (*Dewan Produksi Film Nasional*) berdasarkan SK Menpen No. 34/SK/M/1968, yang anggota-anggotanya terdiri dari orang pemerintah dan orang-orang swasta perfilman. Menurut pemberitaan majalah *Mayapada*, “DPFN dipimpin oleh *Nazaruddin Naib* (Ketua I) yang anggotanya: *Turino Djunaedi, Drs. Asrul Sani, Alam Surawidjaja, Djohardi, J.E. Pandelaki* dan *Kho Kim Sek*.”<sup>17</sup> Kebijakan awal DPFN adalah memberikan saham produksi kepada film-film yang dianggap bermutu. Semakin bermutu film yang dibuat makin banyak saham produksi yang diberikan. Maksud

---

<sup>14</sup> *Kompas*. “Kesempatan Import Film dibuka Bagi Setiap Importir.” Senin, 5 Juni 1967.

<sup>15</sup> Salim Said. *Op. Cit.*, hlm. 78.

<sup>16</sup> *Film News*, no. 9 Tahun 1968.

<sup>17</sup> *Mayapada*. Edisi ke 17 tahun 1968

DPFN ini adalah untuk menggalakkan pembuatan film yang baik dan bermutu tinggi.

DPFN sendiri sempat membuat empat buah film diantaranya: *Si Djampang Mentjari Naga Hitam* (sutradara Lilik Soedjio), *Mat Dower* (sutradara Nya Abbas Akup), *Apa Jang Kau Tjari Palupi* (Asrul Sani), dan *Nji Ronggeng* (Alam Surawidjaja). Tapi kemudian keluar kebijakan No.101/1969 yang membubarkan DPFN karena uang yang dipergunakan untuk menghasilkan sebuah film DPFN hampir dua kali lipat dari pembuatan film biasa.<sup>18</sup> Akibat bantuan dana dari pemerintah, produksi film meningkat dari 21 film pada tahun 1970 menjadi 52 buah film pada tahun 1971. Perkembangan ini dibantu pula oleh BSF (*Badan Sensor Film*) dengan dikendorkannya kriteria seks dan kekerasan. Dilanjutkan dengan dikeluarkannya sejumlah kebijakan lain yaitu Kebijakan No. 40/1971 yang mengatur pemanfaatan uang dari importir, pemberian keringanan bea masuk impor bahan baku dan bea masuk film nasional yang di proses di luar negeri, pembentukan PT Perfin (*Peredaran Film Nasional*), dan SKB (*Surat Keputusan Bersama*) Tiga Menteri yang ditetapkan pada 20 Mei 1975.

## 1.2 Perumusan Permasalahan

Rentang waktu antara tahun 1966-1979 dalam perfilman Indonesia merupakan masa percobaan<sup>19</sup> dengan serangkaian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Deppen. Permasalahan yang dihadapi pemerintah pada saat itu adalah bagaimana cara untuk mendorong produksi film nasional agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta mampu bersaing dengan film-film impor dan bagaimana membangun perfilman nasional agar film-film yang dihasilkan atau diproduksi baik secara tema maupun penyajiannya. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dan salah satunya adalah dengan memberikan bantuan dana bagi produksi film Indonesia yang dananya didapatkan dari para importir

---

<sup>18</sup> Salim Said, *Op Cit*, hlm. 81.

<sup>19</sup> Dalam bukunya yang berjudul profil dunia film Indonesia Salim Said menyebut masa ini sebagai masa rentetan percobaan. *Ibid.* hlm. 75.

film. Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan untuk menjawab permasalahan tersebut diantaranya:

1. Bagaimana perkembangan perfilman Indonesia pada tahun 1966-1979? Serta kebijakan seperti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi film dalam negeri dan mencegah dampak negatif dari masuknya film-film asing?
2. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah tersebut bagi dunia perfilman?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Lingkup periodisasi penulisan ini mencakup keadaan film Indonesia pada tahun 1966 sampai 1979. Lingkup masalahnya dimulai dari awal tahun 1966 saat perfilman Indonesia mulai mencoba bangkit dari keterpurukan yang diikuti tindakan awal Direktorat Film yang berada dibawah Departemen Penerangan dalam mengurus masalah perfilman Indonesia. Tindakan pertama adalah dengan membebaskan para importir untuk memasukkan film impor sebanyak-banyaknya demi menyediakan hiburan untuk rakyat. Tindakan ini berujung pada pengenaan pungutan biaya untuk merehabilitasi film dalam negeri sebesar Rp. 250.000 tiap satu film yang diimport. Sampai akhirnya keluar Surat Keputusan Menteri Penerangan (*Ali Moertopo*) No. 115/Kep/Menpen/1979 tentang pembentukan Dewan Film Nasional yang baru dengan mencabut SK Menteri Penerangan No. 59/Kep/Menpen 1969 tanggal 29 Juli 1969 tentang pembentukan Dewan Film yang sebelumnya ada. Dewan Film ini kemudian bertugas untuk membina perfilman nasional agar menghasilkan film-film yang secara mutu dan penyajiannya baik dan memberikan unsur pendidikan bagi masyarakat. Pembentukan DFN (*Dewan Film Nasional*) pada tahun 1979 ini mengawali perumusan pola pembinaan dan pengembangan perfilman Nasional yang baru yang dikenal dengan P4N.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penulisan ini bertujuan melihat strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap perfilman nasional dalam rangka memproteksi serta mendorong produksi film nasional agar dapat bersaing dengan film impor yang masuk ke Indonesia. Banyak buku-buku yang menulis perfilman di Indonesia dan permasalahannya. Tetapi belum ada tulisan yang secara khusus membahas periode perfilman Indonesia pada tahun 1966 sampai 1980 dimana banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya dibidang perfilman. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengungkapkan secara lebih dalam mengenai sejumlah peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 1966-1979 serta pengaruhnya bagi perfilman nasional, serta dinamika yang terjadi pada perfilman Indonesia pada tahun tersebut.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat langkah yaitu heuristik (pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Pertama, tahap Heuristik, yaitu mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang diperlukan melalui studi pustaka sumber surat kabar, majalah dan arsip-arsip. Umumnya tahap ini penulis lakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Salemba Jakarta untuk mencari data-data dari buku, koran serta majalah. Untuk mendukung penelitian selanjutnya penulis mencari sumber-sumber tertulis baik sekunder maupun primer untuk mendukung penelitian ini di berbagai perpustakaan seperti Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Fakultas Film dan TV (FFTV) Institut Kesenian Jakarta, dan Perpustakaan Pusat Perfilman Usmar Ismail Kuningan Jakarta yang dikenal dengan nama Sinematek.

Tahap kedua, kritik sumber (kritik intern dan ekstern), sumber yang didapatkan selanjutnya perlu melalui kritik sejarah untuk melihat kredibilitasnya sebagai sumber sejarah dan relevansinya dengan penelitian ini baik dari segi



bahan dan isinya. Kritik sumber pada tahap ini dapat dilakukan dengan membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain.

Tahap ketiga, interpretasi, yaitu usaha menginterpretasikan sumber untuk memunculkan berbagai fakta yang dibutuhkan untuk merekonstruksi sejarah yang akan ditulis. Tahap ini dilakukan dengan cara menganalisis fakta-fakta yang ada serta meliputi pemaknaan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari fakta-fakta yang telah diuji untuk dapat ditulis.

Tahap keempat, yaitu Historiografi atau tahap penulisan sejarah. Fakta-fakta sejarah yang ada diseleksi, disusun dan diurutkan secara kronologis dan sistematis. Dalam hal ini, fakta menyangkut sejarah film Indonesia dan Kebijakan Pemerintah Orba terhadap Perfilman Indonesia Tahun 1966-1979.

## 1.6 Sumber Sejarah

Dalam rangka penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber yang diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer<sup>20</sup> penelitian ini adalah koran dan majalah sezaman, serta tulisan yang telah dibukukan dari wartawan yang menulis tentang film pada rentang waktu tahun 1966-1981. Buku tersebut adalah: “Nonton Film Nonton Indonesia” (*JB Kristanto*). Koran yang penulis gunakan sebagai sumber primer diantaranya koran *Berita Yudha*, *Suara Karya*, *Sinar Harapan*, *Harian Rak’jat* dan *Kompas*. Penulis juga menggunakan *Buletin Film* yang kemudian berubah nama menjadi *Film News* serta majalah *Tempo*. Sedangkan sumber sekunder<sup>21</sup> penelitian ini penulis dapatkan dari buku-buku yang ditulis oleh para kritikus film, peneliti sejarah film dan penulis-penulis lainnya yang tertarik pada perkembangan perfilman Indonesia. Buku-buku itu diantaranya, “Profil Dunia Film” (Salim Said) yang

---

<sup>20</sup> Sumber primer adalah kesaksian dengan mata-kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain. Lihat: Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah* (tej. Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI-PRESS. 1986, hlm 35.

<sup>21</sup> Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. *Ibid*.

memuat sejarah perfilman, permasalahan serta orang-orang film; “Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia” (Haris Jauhari); “Dari Gambar Idoep ke Sineplek” (S.M Ardan); dan buku “Perfilman di Indonesia dalam Era Orde Baru” (Amura) yang menuliskan tentang *Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia* (MMPI).

Dalam masa penelitian sumber, penulis menemukan sebuah skripsi dengan judul “Dua Puluh Tahun Perjalanan Perfilman Di Indonesia (1966-1988)” yang ditulis oleh Wahyu Handayani. Tema yang diangkat penulis dengan skripsi yang telah ada ini memang sama yaitu tentang film Indonesia, rentang waktunya juga hampir sama. Yang membedakan skripsi yang telah ada dengan penelitian penulis adalah mengenai pembahasan judul penulisan. Penulis lebih menyoroti pada kebijakan pemerintah terhadap pembangunan perfilman nasional yang tentunya tidak lepas dari perkembangan perfilman itu sendiri. Sedangkan skripsi yang ada lebih melihat pada perjalanan sejarah dari perfilman Indonesia pada periode tahun 1966-1986 secara keseluruhan dan penekanannya pada Yayasan Festival Film dan pencarian pola baru bagi perfilman pada rentang waktu 1981-1986. Oleh karena itu penulis berharap dapat lebih melengkapi informasi mengenai kebijakan pemerintah dan perfilman Indonesia pada tahun 1966-1980.

Sumber-sumber tersebut penulis peroleh antara lain dari Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB UI), Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Perpustakaan Fakultas Film dan TV (FFTV) IKJ, Perpustakaan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI) atau dikenal dengan nama Sinematek.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini akan disusun atas lima bab atau sub-sub judul, diantaranya: Bab 1, merupakan pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber sejarah dan sistematika penulisan.

Bab 2, memuat uraian mengenai *Sejarah Film* yang mulai dikenal di wilayah Indonesia yang waktu itu bernama Hindia Belanda sejak tahun 1900 dan dinamika perfilman Indonesia pada masa kemerdekaan sampai tahun 1960-an.

Bab 3, memaparkan perkembangan perfilman Indonesia selama tahun 1966-1979, pro-kontra dari masyarakat umum maupun perfilman, sistem peredaran film dan mengenai pelaksanaan Festival Film Indonesia (FFI)

Bab 4, membahas mengenai *Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Perfilman Indonesia pada 1966-1979*, berbagai lembaga perfilman yang ada pada masa itu, berbagai pelarangan dan sensor film, serta perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap perfilman dalam negeri.

Bab 5, adalah kesimpulan yang berisi rangkuman isi dari keseluruhan bab sebelumnya dari penelitian ini.

